

# BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi IV / 2014

BASIS DATA RISIKO INVESTASI INFRASTRUKTUR  
BIDANG AIR MINUM SEBAGAI UPAYA MENARIK MINAT INVESTOR  
DALAM KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

KEUNGGULAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI  
DI DAERAH HARUS TERUS DIJAGA

Arah Pengembangan Usaha Dan Kelembagaan Jasa Konstruksi  
Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Jasa Konstruksi

ISSN 1907-0136



9 771907 013646

BULETIN BADAN  
PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung :  
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :  
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;  
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;  
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;  
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;  
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan  
Konstruksi.

Pemimpin Umum :  
Mahbullah Nurdin

Pemimpin Redaksi :  
Hambali

Penyunting / Editor :  
Maria Ulfah  
Kristinawati Pratiwi Hadi

Redaksi Sekretariat :  
Gigih Adikusomo  
Bagus Wicaksono  
Nurasih Asriningtyas  
Yunita Wulandari  
Gama Ayuningtyas

Administrasi dan Distribusi :  
Nanan Abidin  
Sugeng Sunyoto  
Agus Firngadi  
Ahmad Suyaman  
Ahmad Iqbal

Desain dan Tata Letak:  
Nanang Supriadi

Fotografer :  
Sri Bagus Herutomo

Alamat Redaksi :  
Gedung Utama Lt. 10  
Jl. Pattimura No.20 - Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan  
Tlp/Fax. 021-72797848  
E-Mail : datinfo25@gmail.com

# Salam redaksi

**P**erayaan Dirgahayu Kemerdekaan membawa semangat tersendiri. Nasionalisme yang selama ini terendap di sanubari berkobar dengan nyala lebih menggelora. Semangat untuk menghadapi masa depan yang semoga makin gemilang bagi dunia konstruksi Indonesia.

*Untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan, tak ada salahnya jika kita belajar dari sejarah konstruksi Indonesia di masa silam. Pada edisi ini kita mencoba belajar dari salah seorang tokoh konstruksi yang melegenda: Ir. Sutami. Untuk mendapatkan sisi lain cerita Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik ini, kami melakukan wawancara eksklusif dengan salah seorang saksi hidup yang juga merupakan salah satu orang terdekatnya yaitu Ir. Suyono Sosrodarsono.*

*Dari penuturan pak Suyono, kami bisa mendapatkan gambaran mengenai kejeniusan sosok Sutami, juga kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Semangat untuk mengabdikan pada negeri begitu tinggi, tak terhalangi kondisi medan yang penuh keterbatasan, serta fisik yang lemah. Kerja kerasnya pun menghasilkan karya-karya fenomenal yang masih dapat kita nikmati kemegahannya hingga sekarang.*

*Dalam rangka memperkuat barisan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pula Kementerian PU bersama-sama dengan beberapa tokoh hukum dan konstruksi terkemuka dan terpercaya di Indonesia menginisiasi pendirian Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI). Bagaimana bisa pelaku konstruksi bersaing dengan pelaku-pelaku konstruksi global jika masih saja sibuk bersengketa antar sesamanya? Untuk itu kehadiran Badan Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa diharapkan dapat menjadi jalan keluar win-win solution bagi para pelaku konstruksi.*

*Edisi kali ini juga menampilkan konsep pembelajaran melalui metode Pelatihan Jarak Jauh Keahlian Konstruksi (PJJAK) sebagai upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM konstruksi. Redaksi juga menyorot pesatnya pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara yang tak lepas dari peran aktif para pelaku konstruksi di sana, salah satunya ditunjang dengan kinerja LPJKD Provinsi. Bagaimanapun keberhasilan sektor konstruksi memerlukan sinergi setiap stakeholders yang terlibat, dan semangat bersama untuk berkarya lebih baik lagi.*

Selamat membaca!

## Daftar Isi

► Basis Data Risiko Investasi Infrastruktur Bidang Air Minum Sebagai Upaya Menarik Minat Investor Dalam Kerjasama Penyediaan Infrastruktur .....	3
► Arah Pengembangan Usaha Dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Jasa Konstruksi .....	7
► Penghargaan Terbaik Untuk Tim Kerja Badan Pembinaan Konstruksi .....	9
► Life Cycle Cost .....	10
► Distance Learning Keahlian Konstruksi Masa Depan Pengembangan Sumber Daya Manusia Konstruksi .....	12
► Galeri Foto .....	16
► Keunggulan Pembangunan Konstruksi Di Daerah Harus Terus Dijaga .....	18
► Profil Lembaga: LPJKD Sumatera Utara .....	20
► Ir. Sutami : Bapak Pre-stress Concrete Di Indonesia .....	21
► Harapan Solusi Sengketa Kontrak Konstruksi: Pendirian Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia .....	24
► Lanjutkan Perjuangan Membangun Sektor Konstruksi .....	26

# BASIS DATA RISIKO INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG AIR MINUM SEBAGAI UPAYA MENARIK MINAT INVESTOR DALAM KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Oleh: **Agita Widjayanto\*) Decki Rahadian Firdiansyah \*\*)**

## Pendahuluan

Pemerintah berusaha menggandeng sektor swasta untuk ikut terlibat dalam pengusahaan suatu proyek infrastruktur dengan skema PPP (*Public Private Partnership*) guna mempercepat penyediaan infrastruktur di Indonesia. Melalui skema PPP, pihak swasta bukan hanya mendapatkan kesempatan untuk berinvestasi tetapi juga membantu Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur. Kebutuhan pendanaan ini diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan nasional sebesar 7% di mana total perkiraan kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur yang ditetapkan dalam MP3EI untuk RPJMN 2010-2014 adalah sebesar Rp. 1.923,7 Triliun. Dari sekian jumlah kebutuhan tersebut, kemampuan Pemerintah hanya sekitar Rp. 559,54 Triliun. Potensi pendanaan yang bersumber dari Non APBN (BUMN, swasta, dan APBD) adalah sekitar Rp 1.040,59 Triliun. Prediksi gap (kekurangan) pendanaan infrastruktur untuk periode 2010-2014 adalah sekitar Rp. 323,67 Triliun.

Hingga saat ini realisasi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur masih belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Salah satu yang menjadi kendala adalah kurangnya informasi mengenai tingkat risiko yang cukup tinggi menyertai investasi infrastruktur tersebut. Tingkat risiko yang cukup tinggi tersebut timbul karena karakteristik investasi infrastruktur yang cukup unik dibandingkan dengan jenis investasi lainnya, yaitu:

- membutuhkan dana yang cukup besar;
- masa konsesi berlangsung dalam jangka waktu yang panjang;
- pengembalian investasi tergantung pada masa konsesi;
- seringkali timbul masalah-masalah berkaitan dengan *financial close* dan *environment effects* untuk pembebasan lahan;
- ketidakpastian realisasi tingkat balikan investasi (*return on investment*).

Dengan tingginya tingkat risiko investasi infrastruktur terutama yang berkaitan dengan karakteristik yang menyertainya tersebut, maka diperlukan sejumlah langkah kebijakan manajemen risiko agar proyek pengembangan infrastruktur tersebut dapat diwujudkan. Melalui manajemen risiko proyek infrastruktur tersebut diharapkan tingkat bunga pinjaman dan premi asuransi risiko bisa ditekan mendekati

nilai riil. Tujuan akhirnya adalah untuk lebih menarik investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur melalui mekanisme KPS.

### Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Mengingat pentingnya air minum sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah telah menetapkan target MDG air minum sebesar 68,87% pada tahun 2015 dan sebesar 100% akses aman air minum pada tahun 2019 dalam RPJPN. Untuk itu diperlukan pendanaan sebesar kurang lebih Rp. 274,8 Triliun, di mana sumber dana selain APBN (termasuk dari swasta) mencapai Rp. 27,5 Triliun. Kebutuhan pendanaan tersebut sangat besar sehingga Pemerintah selalu berupaya agar dapat lebih menarik minat swasta untuk ikut serta dalam program pengembangan SPAM. Salah satu upaya tersebut adalah melalui KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk pengembangan SPAM.



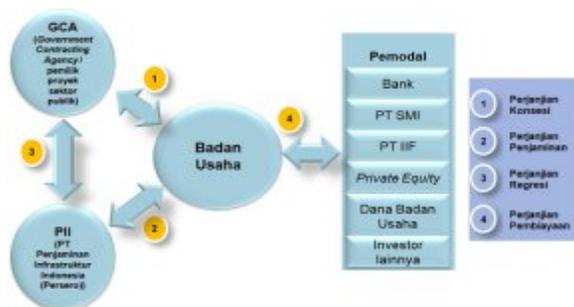
Gambar . Kelembagaan KPS

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau dalam bahasa Inggris biasa disebut Public Private Partnership (PPP) adalah kerjasama jangka panjang (umumnya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta, dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan suatu proyek Pemerintah dalam penyediaan fasilitas (termasuk di dalamnya infrastruktur) dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam penyediaan pelayanan ataupun fasilitas dibagi antara pemerintah dan swasta atau antara keduanya. KPS di Indonesia sudah ada sejak masa lalu walaupun aturan pemerintah tentang KPS baru muncul dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005

tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2013.

Institusi-institusi yang terlibat dalam eksekusi proyek-proyek KPS umumnya ada 4 pihak, yaitu :

- Kementerian selaku institusi yang mengeluarkan kebijakan dan strategi terkait KPS.
- Regulator selaku badan/institusi yang umumnya juga bertindak sebagai kepanjangan tangan Kementerian terkait yang bertugas sebagai pengatur, pembina, dan pengawas KPS.
- Penanggung jawab proyek kerjasama (PJK) atau *contracting agency* yaitu mitra badan usaha swasta (*operator*) yang mewakili pemerintah dalam KPS.
- Operator selaku badan usaha swasta yang mengusahakan penyediaan infrastruktur.



Gambar Sinergitas dalam proyek KPS

Selain institusi-institusi di atas, proyek KPS juga memerlukan dukungan institusi-institusi lainnya yang berkaitan dengan pendanaan dan penjaminan proyek. Agar KPS dapat berjalan dengan baik diperlukan suatu proses saling mendukung antara pihak-pihak terkait, baik yang terlibat dalam eksekusi proyek KPS maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan dan penjaminan proyek. Sinergitas tersebut dituangkan dalam perjanjian-perjanjian kerja antara masing-masing pihak.

Selain itu, KPS memiliki beberapa ciri khas lainnya dibandingkan jenis bentuk-bentuk kerjasama lainnya, antara lain :

- Penerapan konsep "value for money" dalam rencana bisnis KPS.
- Penyediaan layanan kepada masyarakat umum.
- Potensi alih teknologi dan inovasi dari pihak swasta kepada pemerintah.
- Perluasan aksesibilitas dalam penyediaan modal untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Dengan ciri-ciri yang dimilikinya tersebut sejatinya KPS mempunyai potensi yang cukup besar dalam membantu pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

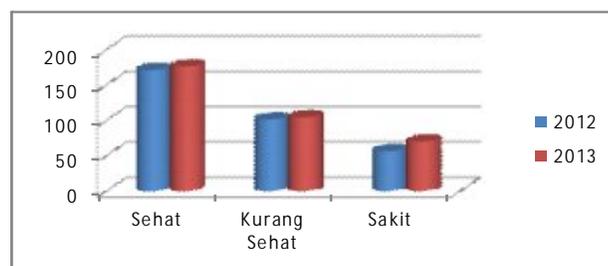
Kondisi Kinerja PDAM dalam Sistem Penyediaan Air Minum Pada tahun 2012 dan 2013, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap PDAM berdasarkan laporan audit kinerja PDAM yang dilakukan oleh BPKP dan KAP. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi kinerja PDAM adalah sebagai berikut :

Kategori	Jumlah PDAM		Prosentase	
	2012	2013	2012	2013
Sehat	171	176	52%	50%
Kurang Sehat	101	104	31%	30%
Sakit	56	70	17%	20%
Jumlah	328	350	100%	100%

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2012 dan 2013

Prinsip yang digunakan dalam penilaian kinerja PDAM oleh BPPSPAM yaitu pendekatan Balance Score Card. Adapun masing-masing aspek yang dinilai terdiri dari :

- Aspek Keuangan, dengan bobot 25%.
- Aspek Pelayanan, dengan bobot 25%.
- Aspek Operasional, dengan bobot 35%.
- Aspek Sumber Daya Manusia, dengan bobot 15%.



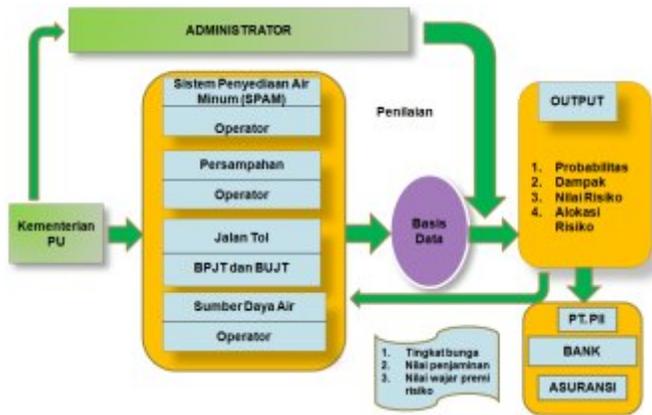
Gambar . Perbandingan Kinerja PDAM Tahun 2012 dan 2013

Evaluasi kinerja PDAM oleh BPPSPAM dengan empat aspek tersebut menghasilkan PDAM dengan tiga kategori yakni Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit. Dari hasil perbandingan kinerja PDAM tahun 2012 dan 2013 dapat disimpulkan bahwa walaupun jumlah PDAM kategori Sehat mengalami sedikit peningkatan, jumlah PDAM berkategori Kurang Sehat dan Sakit masih mendominasi. Masih banyaknya jumlah PDAM Kurang Sehat dan Sakit tersebut menandakan bahwasanya pengelolaan risiko yang dilakukan oleh PDAM masih perlu dibenahi. Dengan pengelolaan risiko yang baik dan benar diharapkan masing-masing PDAM dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh suatu risiko sehingga dapat meningkatkan status mereka menjadi Sehat.

Konsepsi Sistem Informasi Pengelolaan Risiko Bidang Air Minum

Sebagai upaya untuk menjembatani penjaminan risiko proyek KPS terhadap suatu proyek pengembangan infrastruktur; baik sektor jalan tol, air minum, persampahan, dan Sumber Daya Air (SDA); maka perlu dikembangkan suatu model sistem informasi pengelolaan risiko. Sistem informasi yang dibangun menggunakan suatu basis data yang reliable diharapkan dapat memberikan gambaran dari risiko-risiko yang pernah dan

akan dihadapi oleh penyelenggara infrastruktur tersebut. Melalui basis data tersebut diharapkan para pemangku kepentingan dapat memproses langkah-langkah antisipatif untuk penanggulangan risiko.



Gambar . Model Sistem Informasi Pengelolaan Risiko

Model sistem informasi pengelolaan risiko bidang air minum dapat digambarkan sebagai sebuah model yang memberikan kesempatan kepada setiap pemangku kepentingan bidang air minum untuk berkontribusi dalam manajemen risiko air minum dengan cara memberikan penilaian dan mencatat suatu risiko; baik dampak, probabilitas, nilai, ataupun alokasi risikonya; ke dalam suatu basis data terintegrasi. Pengguna sistem informasi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) level, yaitu administrator dan user (pengguna biasa). Administrator bertindak sebagai pihak yang membangun, memelihara, dan memanfaatkan basis data untuk membantu pengambilan keputusan dalam manajemen risiko infrastruktur, sedangkan pengguna biasa bertindak sebagai pihak yang mengisi dan meng-update basis data. Ada pun pengguna biasa adalah pihak-pihak yang terlibat dalam KPS baik Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)/contracting agency atau badan usaha selaku operator KPS.

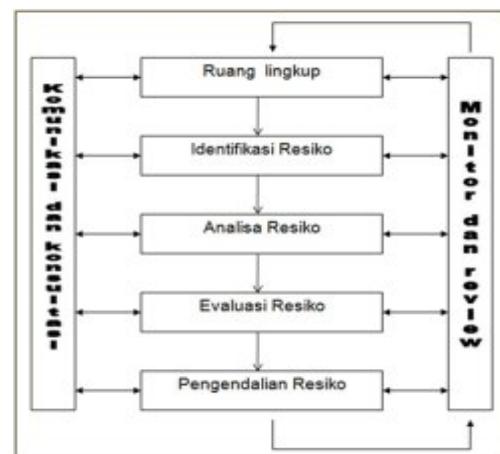
Hasil/output dari sistem informasi tersebut adalah probabilitas, dampak, nilai, dan alokasi masing-masing risiko yang telah teridentifikasi. Hasil tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga pembiayaan dan penjaminan infrastruktur seperti PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII), pihak perbankan, dan pihak asuransi untuk :

- menghitung tingkat bunga pinjaman yang wajar,
- mempercepat proses risk assessment profile dan penentuan nilai dan bentuk penjaminan risiko, dan
- menghitung nilai wajar premi risiko.

Dengan semakin dapat ditekannya nilai premi risiko hingga mendekati nilai riilnya, nilai investasi suatu proyek infrastruktur diharapkan dapat ditekan juga. Kondisi ini diharapkan dapat menarik para investor untuk berpartisipasi dalam proyek air minum.

Metodologi Sistem Informasi Pengelolaan Risiko Bidang Air Minum

Sistem informasi pengelolaan risiko bidang air minum dibangun dengan menggunakan tahapan manajemen risiko sebagai dasarnya. Untuk sistem informasi ini, ruang lingkungannya adalah segala hal yang berkaitan dengan penyediaan air minum oleh pemerintah melalui KPS. Hal pertama yang dilakukan oleh sistem adalah melakukan identifikasi risiko dengan menggunakan pendekatan siklus hidup proyek (*project life cycle*) yang meliputi : *survey, investigation, design, land acquisition, construction, operation, and maintenance* (SIDLACOM). Hasil identifikasi risiko kemudian dianalisa lebih lanjut untuk menentukan signifikansi risikonya. Selanjutnya dilakukan evaluasi risiko guna menentukan peringkat masing-masing risiko. Dari analisa risiko tersebut juga dihasilkan pengendalian risiko berupa alokasi risiko untuk masing-masing pihak yang terlibat dalam KPS. Pada masing-masing tahapan manajemen risiko diperlukan proses komunikasi dan konsultasi serta *monitoring* dan *review* untuk mengetahui validitas masing-masing risiko yang telah diproses.



Gambar . Tahapan manajemen risiko

Tahap pertama yang dilakukan oleh sistem informasi ini adalah penentuan ruang lingkup sistem manajemen risiko yang hendak dibangun, yang dalam hal ini adalah sistem informasi pengelolaan risiko bidang air minum. Tahapan berikutnya setelah dilakukan penentuan ruang lingkup adalah identifikasi risiko berupa inventarisasi dan pengelompokan risiko berdasarkan siklus hidup proyek. Mengingat karakteristik dari setiap proyek KPS air minum berbeda, hasil dari identifikasi risiko untuk masing-masing proyek KPS dapat berbeda pula. Suatu risiko yang dianggap signifikan pada suatu proyek KPS di suatu lokasi belum tentu dianggap sama derajat signifikansinya oleh proyek KPS di lokasi lain.

Tahap ketiga adalah melakukan analisa risiko guna mengklasifikasi risiko yang telah diidentifikasi. Klasifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) variabel utama, yaitu : dampak risiko dan probabilitas (tingkat kemungkinan terjadinya) risiko. Untuk masing-masing risiko dinilai seberapa besar rasio dampak risiko terhadap nilai proyek. Semakin

tinggi nilai rasio dampaknya, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Selain melakukan pengukuran terhadap dampak risiko, sistem juga mengukur seberapa sering kemungkinan risiko tersebut terjadi dalam suatu proyek. Semakin sering risiko tersebut timbul, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Selanjutnya, nilai dampak dan probabilitas tersebut dikalikan untuk mengetahui derajat risiko. Risiko-risiko yang berada pada area berwarna merah pada gambar 4 dianggap memiliki derajat tinggi yang harus mendapat perhatian lebih.

Kemungkinan		DAMPAK				
		1	2	3	4	5
Kemungkinan Kejadian	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
<b>RENDAH</b>		<b>SEDANG</b>		<b>SIGNIFIKAN</b>		<b>TINGGI</b>

Gambar 7. Penilaian risiko berdasarkan dampak dan probabilitas risiko

Tahap keempat adalah melakukan evaluasi risiko sebagai langkah awal penanggulangan risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan melakukan pemeringkatan (*rating*) semua risiko yang kemungkinan timbul dalam KPS. Dari hasil evaluasi risiko tersebut akan diketahui risiko yang paling rentan mengganggu pelaksanaan proyek infrastruktur air minum berdasarkan siklus hidup bisnis air minum.

Dari analisa risiko tersebut juga dihasilkan pengendalian risiko berupa alokasi risiko untuk masing-masing pihak yang terlibat dalam KPS. Pengendalian risiko memegang peranan yang cukup besar karena pada tahapan inilah kemungkinan dampak suatu risiko ditangani. Pola-pola pengendalian risiko yang dapat dilakukan pada tahapan ini misalnya:

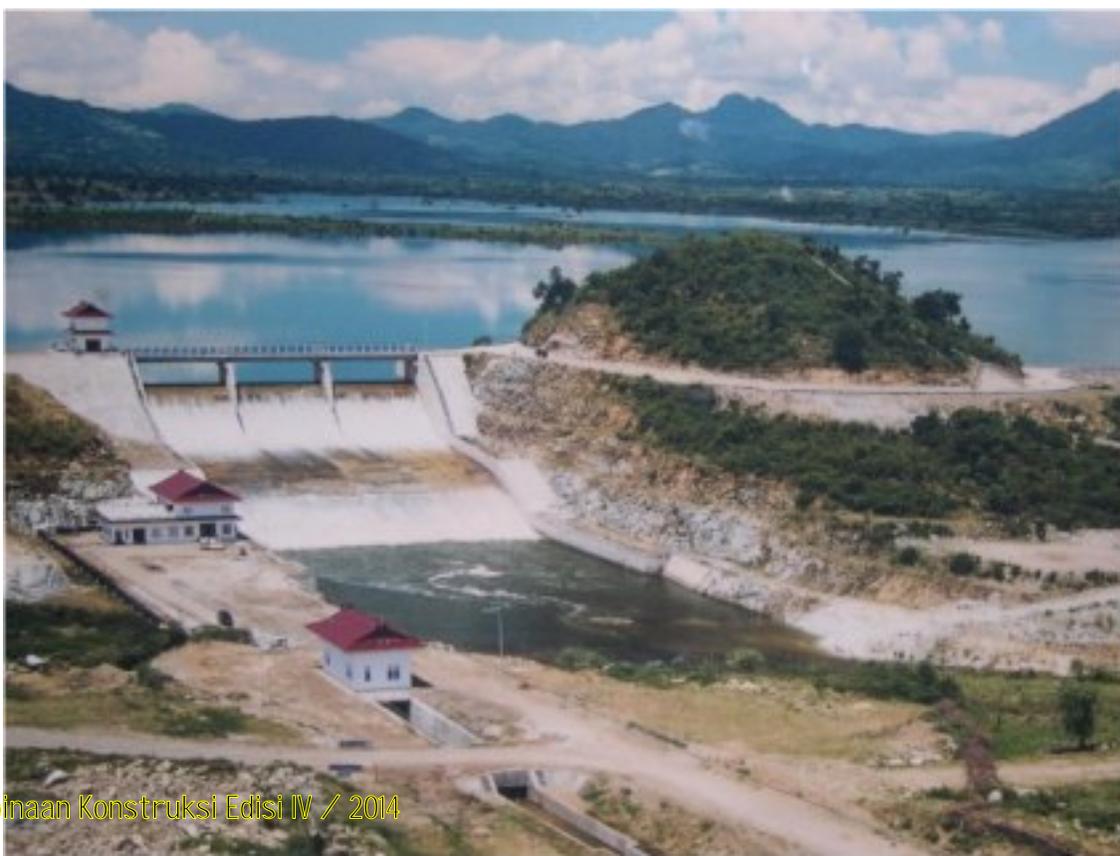
- menghindari risiko, yaitu melakukan segala daya upaya agar tidak terjadi risiko;
- mitigasi risiko, yaitu risiko yang telah diidentifikasi diupayakan untuk ditangani dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di depan;
- retensi risiko, yaitu risiko yang telah diidentifikasi diupayakan untuk ditangani dengan sebelumnya melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengurangi dampaknya terlebih dahulu;
- transfer risiko, yaitu melakukan pengalihan risiko kepada pihak lain yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proyek.

### Pengembangan ke Depan Sistem Informasi Pengelolaan Risiko Bidang Air Minum

Pembangunan sistem informasi ini bukan sekedar untuk membantu identifikasi risiko dan pola penanganan risiko saja, namun juga untuk memberikan umpan tarik (*feedback*) baik kepada pihak investor swasta maupun pihak-pihak yang terlibat pendanaan dan penjaminan proyek agar semakin tertarik untuk berperan serta dalam penyediaan infrastruktur. Walaupun demikian, masih terdapat ruang untuk dilakukan pengembangan pada sistem informasi yang telah dibangun. Pengembangan ke depan yang dirasakan perlu untuk dilakukan meliputi:

- Kelembagaan pengelolaan sistem informasi pengelolaan risiko air minum.
- Penyempurnaan dan pengembangan metodologi sistem informasi.
- Peraturan yang mengikat masing-masing pemangku kepentingan untuk mengisi, meng-*update* atau memelihara sistem informasi.

Penulis \*) Kabid Pengembangan Pola Investasi,  
Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi  
\*\*) Kasubbid Pengembangan Strategi Investasi



## ARAH PENGEMBANGAN USAHA DAN KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Oleh :  
**Ir. Kimron Manik \*)**, **Ellis Sumarna \*\*)**, **Herry Kurniawan \*\*\*)**



Dalam diskusi ini, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan yang mendesak bagi para pengguna layanan sudah begitu tinggi namun tidak diikuti kesiapan lembaga terkait. Hal ini terlihat pada usulan untuk menghilangkan sertifikasi yang belum tentu memberikan kemajuan apabila dipenuhi usulan tersebut. Karena sesungguhnya mengelola konstruksi tidak semudah menciptakan aspek desain teknis suatu perencanaan, tetapi lebih dari itu, kita juga mengelola masyarakatnya. Untuk itu diperlukan tidak hanya kebijakan yang mampu menggerakkan masyarakat jasa konstruksi untuk bergerak ke arah desain yang kita inginkan, namun juga pemikiran dari kalangan akademisi untuk pemecahan persoalan non teknis dalam dunia konstruksi.

**M**emasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 4 Tahun 2015-2019, Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan memiliki tugas penting dalam membuat suatu perencanaan strategis serta menyusun suatu roadmap arah pengembangan usaha dan kelembagaan jasa konstruksi. Berbagai perspektif bermunculan dalam proses penyusunan rencana strategis dan arah pembinaan pengembangan usaha dan kelembagaan jasa konstruksi untuk 4 tahun kedepan di antaranya kalangan akademisi dari ITB yang melakukan diskusi terbatas dengan Badan Pembinaan Konstruksi. Pada diskusi terbatas kali ini dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE dan kalangan akademisi yang berasal dari Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) diantaranya adalah Prof.

Rizal Tamin, Dr. Biemo W. Soemardi, Prof. Senator N. Bahagia, Dr. Krishna S Pribadi, Dr. Reini D. Wirahadikusumah, Dr. M. Abduh, Dr. Dewi Larasati, serta perwakilan dari LPJK Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan, Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc. menyatakan bahwa saat ini telah terbentuk pemahaman baru mengenai proses pembinaan konstruksi yang telah



dilaksanakan antara BP Konstruksi dan LPJK. Selain itu juga perubahan konsep antara lembaga masyarakat ke lembaga *semi-government* perlu dipahami sebagai benang merah bagi Pusat Usaha dan Kelembagaan itu sendiri.

### Konsep Interaksi Antar Lembaga Jasa Konstruksi

Pada tataran sistem industri konstruksi nasional, terdapat interaksi antar lembaga yaitu kontraktor-konsultan-masyarakat pengguna. Dalam interaksi tersebut diperlukan peranan akademisi yang memberikan masukan kepada Pemerintah dalam hal ini BP Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah dan LPJKN/LPJKD.

Secara sistematis, upaya pengembangan usaha berawal dari keberadaan sistem nilai berupa situasi lingkungan yang kondusif (jaminan keamanan, HAM, dan demokrasi), etika, serta identitas yang kuat. Selain itu tak kalah penting juga adanya partisipasi dan kontribusi yang maksimal, kreativitas serta inovasi. Berangkat dari sistem nilai tersebut, dibangunlah prinsip suatu lembaga yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan menghasilkan manfaat. Pada tahap berikutnya, dapat dikembangkan suatu model pembangunan industri konstruksi yang berbasiskan masyarakat dan membangun sebuah sistem berupa keberadaan institusi resmi (*legal institution*) dan proses bisnis yang

terhadap sub-sub sistem tersebut untuk menilai risiko dan efektifitasnya. Lebih jauh, bahkan dapat diperluas penilaiannya untuk melihat apakah ada distorsi sistem, proses bisnis, serta perilaku *stakeholders*. Dengan demikian, diharapkan kita dapat membangun sebuah sistem yang baik, bukan hanya sebagai bagian proses administrasi keuangan semata. Konsep pengaturan menurut UU 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah :1). Pemahaman utuh mengenai sistem jasa konstruksi; 2). Pengaturan bisnis konstruksi dan profesional tenaga ahli; 3). Fungsi pemerintah dan *buffer body* (LPJKN) serta skenario pengembangannya (yang menjadi tanggung jawab pemerintah); 4). Konsep fungsi manfaat dari sertifikasi, registrasi dan lisensi. Kondisi tersebut merupakan kondisi dasar dalam kegiatan pengembangan jasa konstruksi (*baseline condition*) yang pada praktiknya di lapangan seringkali menghambat perkembangan jasa konstruksi itu sendiri.



Prof. Rizal Tamin juga menyampaikan bahwa perlu adanya kesamaan konsep atau pandangan terhadap arah pengembangan dan pembinaan konstruksi saat ini dengan merujuk pada misi Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan (PPUK) sebagai pusat yang melaksanakan: Pembinaan Pengembangan Usaha; Pendukung Usaha; Regulasi usaha dan perizinan; dan Kelembagaan. Tujuan pembinaan itu sendiri pada dasarnya adalah menimbulkan pemahaman atas hak dan kewajiban antara penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

berjalan dengan baik. Baru kemudian menentukan kebijakan, berupa strategi/taktik pencapaian yang dituangkan dalam bentuk program/penyerapan anggaran.

Pembinaan Usaha dan Kelembagaan sebagai Sub Sistem dalam Sistem Jasa Konstruksi Nasional

Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan merupakan sebuah sub organisasi yang menjadi bagian dari suatu system, dalam sebuah sistem besar jasa konstruksi nasional. Setiap sub organisasi tersebut tentunya memiliki tujuan yang beragam, sehingga diperlukan tinjauan secara parsial

Kalangan akademisi memandang perlu adanya sistem terintegrasi yang mampu menjembatani peranan Perguruan Tinggi dan Pemerintah dalam proses pengembangan jasa konstruksi. Peran perguruan tinggi tersebut saat ini telah terlaksana dengan baik seperti pelaksanaan Diklat yang merupakan proses pembentukan pemimpin yang berkarakter, penerapan sistem mutu, sistem K3, kegagalan bangunan dan daya saing industri konstruksi nasional (IKN). Perlu waktu lama dan proses yang tidak instan untuk dapat melihat peran dunia pendidikan, sehingga tidak secara signifikan berdampak pada peningkatan daya saing industri konstruksi nasional. Kedepannya diharapkan terjadi peningkatan atas peran dunia akademisi terhadap pengembangan usaha jasa konstruksi dalam bentuk upaya moral (*moral force*), dan perluasan pemaknaan baik kepada pemerintah, masyarakat asosiasi perusahaan dan profesional tenaga ahli.



Penulis \*) Kabid Pengembangan Usaha, Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan  
 \*\*) Kasubbid Pendukung Usaha  
 \*\*\*) Staf Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan

# PENGHARGAAN TERBAIK UNTUK TIM KERJA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pagi itu setelah senam bersama, keluarga besar Badan Pembinaan Konstruksi bertemu sambil menyeruput kopi, teh, dan penganan ringan sebagai sarapan. Coffee morning di hari itu istimewa karena keluarga besar BP Konstruksi, mendengarkan presentasi dari beberapa pegawai terbaiknya yang telah usai menunaikan tugas belajar.

Mereka adalah Atina Dwi Palupi, Wigati Kudus Santoso, Dewi Rahmawaty, dan Adityo Budi Utomo. Presentasi mereka menarik diskusi dan menyegarkan kembali wawasan keilmuan. Tak jarang pertanyaan diajukan dari peserta yang hadir, tak terkecuali Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini.

Namun tak hanya sampai di sana kebahagiaan di pagi hari itu. Karena salah satu tim kerja Badan Pembinaan Konstruksi, lebih tepatnya Bidang Regulasi dan Perijinan Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pekerjaan Umum yang dalam hal ini diserahkan oleh Kepala BP Konstruksi Hedyanto W. Husaini.

Penghargaan tersebut adalah untuk Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Selain institusi, Menteri PU memberikan penghargaan ini juga untuk personel tim Perizinan yang dimaksud, yaitu Putut Maharyudi, Anjar Pramularsih, Riko Hadi Prasetyo, Juli Arta Simangunsong, Agung Dermawan, dan Sutoro.

Tentang Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) merupakan izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUJKA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia.

Keberadaan BUJKA di Indonesia ini sudah diatur sejak tahun 1985 dalam Kepmen PU Nomor 502/KPTS/1985.

Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali perubahan peraturan, yakni pada tahun 1991 dan 2006, pada tahun 2011 diterbitkan Permen PU No. 5/PRT/M/2011 yang saat ini menjadi pedoman dalam pengaturan BUJK Asing di Indonesia. Saat ini (per-Agustus 2014) jumlah BUJKA aktif di Indonesia sebanyak 295 badan usaha, terdiri atas 169 kontraktor pelaksana, 74 konsultan, dan 52 terintegrasi; yang didominasi badan usaha dari Jepang, Korea Selatan dan Cina.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan perizinan, sesuai dengan Permen PU No. 8/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU, tugas layanan perizinan dilaksanakan di Bidang Regulasi dan Perizinan, Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan, Badan Pembinaan Konstruksi. Sebelum terbentuk Satminkal Jasa Konstruksi melalui UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pelaksanaan layanan perizinan ini dilaksanakan oleh Biro Bina Sarana Perusahaan, Sekretariat Jenderal PU.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, layanan perizinan perwakilan BUJKA ini termasuk layanan publik yang harus memenuhi standar layanan publik. Pada awal tahun (Maret-Mei) 2013, Ombudsman selaku lembaga yang mengawal dan memantau kinerja layanan publik di Indonesia melakukan monitoring layanan publik di lingkungan kementerian, badan dan lembaga. Unit Layanan Perizinan Perwakilan BUJKA secara random menjadi sampel untuk dinilai kinerjanya.

Dalam penilaian tersebut Unit Layanan Perizinan Perwakilan BUJKA memperoleh hasil yang tidak menggembirakan, karena masuk dalam zona merah layanan perizinan yang berarti tidak sesuai dengan standar layanan publik. Tentu saja hal ini menjadi koreksi besar bagi Kementerian PU untuk segera memperbaiki diri. Sesuai dengan motto Kementerian PU; Bekerja Keras, Bertindak Cepat, Bertindak Tepat, dalam waktu singkat (7 Hari) dan sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Badan Pembinaan



Konstruksi secara langsung, Unit layanan Perizinan Perwakilan BUJKA mampu memperbaiki diri dan bisa masuk ke zona Hijau dan mendapat apresiasi lebih dari Ombudsman atas respon yang cepat dari Kementerian PU.

Selanjutnya secara resmi Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 18 Juli 2014 memberikan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Publik kepada Unit Layanan Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan, Badan Pembinaan Konstruksi. Terkait dengan pencapaian predikat dari Ombudsman tersebutlah, Menteri Pekerjaan Umum memberikan penghargaan atas prestasi dan kinerja kepada Unit Layanan Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Diharapkan dengan adanya pencapaian ini bisa terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan perizinan perwakilan BUJKA, sekaligus memacu tim kerja Badan Pembinaan Konstruksi yang lain untuk bekerja lebih baik dan lebih semangat untuk melayani rakyat! (tw&anjar)

# LIFE CYCLE COST

Oleh: Daony Silitonga

Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan manusia, dan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan gerak laju perekonomian suatu negara. Setelah selesai dibangun, suatu infrastruktur diharapkan mampu menjalankan fungsinya sesuai umur rencananya. Akan tetapi dengan bertambahnya umur suatu infrastruktur atau bangunan, terjadi penurunan kinerja bangunan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan di sekitar bangunan dan juga penggunaan material yang tidak tepat.

Seringkali pembangunan suatu infrastruktur dilakukan dengan menggunakan material bangunan dengan kualitas yang kurang baik ataupun harga yang lebih murah, dengan maksud menurunkan biaya awal dari suatu pekerjaan pembangunan, agar diperoleh keuntungan yang lebih. Namun pembangunan dengan kualitas material bangunan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dapat mengakibatkan bangunan cepat mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan pemeliharaan yang lebih sering. Dengan intensitas pemeliharaan yang lebih sering, maka frekuensi penggantian dan perbaikan juga akan semakin sering dilakukan selama umur rencana bangunan tersebut. Hal ini menghasilkan biaya pemeliharaan yang tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan biaya keseluruhan siklus proyek juga akan tinggi.

Untuk itu, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang pada umumnya memerlukan investasi yang besar, dan seringkali memiliki risiko tinggi, tentunya memerlukan suatu

upaya penambahan fungsi dan manfaat untuk dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang optimum. Dalam mencapai sasaran tersebut, identifikasi fungsi untuk menciptakan gagasan kreatif dan inovatif yang diikuti dengan evaluasi terhadap biaya siklus hidup (Life Cycle Cost/ LCC) dalam suatu proyek pembangunan infrastruktur, diyakini merupakan suatu cara terbaik untuk dapat menghasilkan suatu pilihan desain terbaik.

*Life Cycle Cost* (LCC) adalah suatu metode ekonomi dalam mengevaluasi proyek konstruksi atas semua biaya yang timbul mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, bahkan pembongkaran atau pembuangan suatu komponen dari sebuah bangunan, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya barang atau jasa sesuai jangka waktu atau siklus hidupnya, sebagai pertimbangan yang penting untuk mengambil suatu keputusan pemilihan desain terbaik dengan biaya yang paling optimal.

## Manfaat

Metode LCC ini berguna untuk menganalisis nilai ekonomis sebuah bangunan dengan mempertimbangkan biaya pengoperasian sepanjang umur hidup bangunan tersebut. LCC memberikan gambaran keseluruhan biaya proyek konstruksi dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai ekonomis dengan mempertimbangkan lokasi, perencanaan teknik dan arsitektur, pembangunan, pengaturan, pengoperasian dan pemeliharaan sampai dengan pembuangan yang diikuti dengan penggantian dari komponen atau sistem selama jangka waktu umur hidup bangunan.

## Manfaat Analisis *Life Cycle Cost*

- Untuk meningkatkan kesadaran biaya. Penerapan LCC akan meningkatkan kesadaran akan manajemen dan insinyur pada faktor-faktor yang mendorong biaya dan sumber daya yang diperlukan oleh item, sehingga bisa dilakukan program pengurangan biaya.
- Seluruh biaya hidup evaluasi. LCC memungkinkan evaluasi pilihan bersaing berdasarkan seluruh biaya hidup.
- Memaksimalkan pendapatan. Dengan menerapkan LCC, operasi dan biaya pemeliharaan berkurang tanpa *scarifying* kinerja alat produksi melalui analisis parameter kinerja dan biaya *driver*.
- Memahami prosedur untuk menerapkan LCC termasuk pengembangan Biaya Siklus Hidup model untuk berbagai aplikasi.
- Memahami latar belakang teoritis nilai waktu uang dan analisis risiko serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan

Penggunaan *Life Cycle Cost* (Biaya Siklus Hidup) efektif dalam proses pengambilan keputusan, dengan konsep sebagai berikut:

- Mengidentifikasi total biaya yang dilakukan dalam perolehan suatu aset
- Memudahkan dalam pengambilan keputusan dari berbagai metode alternatif dengan mempertimbangkan berbagai pilihan yang menampilkan modal dan biaya operasional yang berbeda
- Merupakan perangkat manajemen yang merinci biaya modal, biaya operasional dan biaya penggantian

LCC diaplikasikan sejak tahap awal, desain, pengadaan, hingga tahap

konstruksi. Selain itu, penerapan LCC juga dilakukan selama masa penggunaan dan pekerjaan proyek, untuk konservasi energi dan keberlanjutan.

Adapun komponen LCC meliputi:

- Biaya awal meliputi biaya pemilik terkait dengan pembangunan awal proyek
- Keuangan meliputi biaya hutang terkait dengan biaya awal
- Biaya Operasional (Energi); biaya yang digunakan untuk menghitung barang-barang seperti bahan bakar dan gaji diperlukan untuk pengoperasian
- Biaya pemeliharaan termasuk biaya rutin perawatan kustodian dan perbaikan, pemeliharaan kontrak tahunan dan gaji staf
- Biaya Perubahan adalah biaya yang terlibat dalam mengubah fungsi ruang. Biaya penggantian akan menjadi tergabung satu biaya yang harus dikeluarkan ke depannya untuk mempertahankan fungsi asli
- Biaya yang termaksud dalam biaya lain yang tidak tersebut di atas, namun terkait proyek

Dengan kata lain biaya bangunan adalah biaya selama umur rencana bangunan. Karena itu, Life Cycle Cost dapat dirumuskan seperti di bawah ini.

$$\text{LCC} = \text{Biaya Awal} + \text{Biaya Penggunaan} + \text{Biaya Pembongkaran}$$

Dimana, biaya awal adalah biaya perencanaan dan pembangunan, biaya penggunaan adalah biaya yang dikeluarkan selama bangunan beroperasi (biaya operasi dan pemeliharaan), dan biaya pembongkaran adalah biaya untuk pembongkaran bangunan setelah umur rencana bangunan berakhir.

Rencana *Life Cycle Cost* merupakan suatu rencana mengenai pengeluaran usulan dari suatu proyek konstruksi sepanjang usia proyek tersebut. Seluruh tahapan proyek mulai dari ide, studi kelayakan, perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan bahkan pembongkaran membutuhkan

bermacam-macam biaya yang dikelompokkan menjadi beberapa komponen yaitu:

1. Biaya Modal:  
Meliputi Biaya Langsung (Direct Cost) dan Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)
2. Biaya Penggunaan  
Meliputi Biaya Pemeliharaan, Biaya Pendekorasi Kembali, Biaya Pekerjaan Tambahan (Minor New Work), Biaya Energi, Biaya Kebersihan, Ongkos-Ongkos Umum, dan Manajemen Estate.
3. Biaya Pembongkaran

Faktor yang dianggap penting dan berhubungan dengan Life Cycle Cost, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usia Bangunan
  - a. Usia Fisik
  - b. Usia Fungsional
  - c. Usia Ekonomi
2. Usia Komponen
3. Suku Bunga
4. Perpajakan
5. Metode Desain
6. Kualitas Dalam Konstruksi

Metode untuk melakukan analisis Life Cycle Cost adalah penentuan target biaya (*target costing*), Teori Kendala (*theory of constraint*) dan *Life Cycle Costing*. Penentuan biaya target digunakan untuk mengelola biaya, terutama dalam aktivitas desain. Teori kendala digunakan untuk mengelola biaya produksi. *Life-cycle costing* digunakan pada seluruh *life cycle cost* untuk meminimumkan biaya secara keseluruhan.

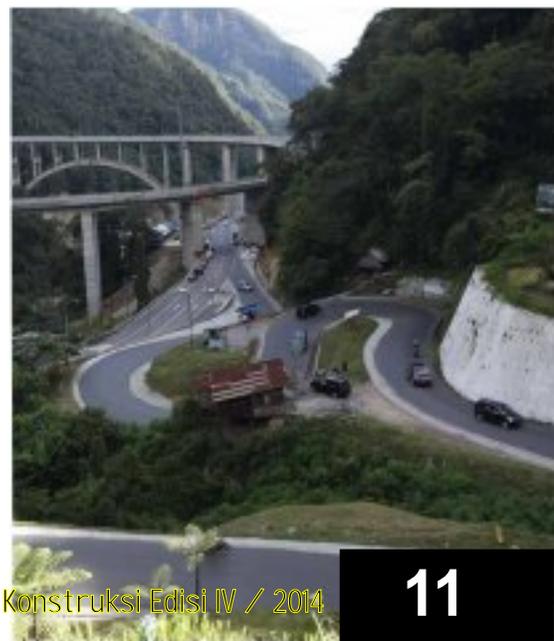
Pelatihan *Life Cycle Cost*

Mengingat pentingnya analisis biaya siklus hidup dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, Badan Pembinaan Konstruksi - Kementerian Pekerjaan Umum, bekerjasama dengan

*School of Quantity Surveyor Indonesia (S Q S Indonesia)*, telah menyelenggarakan Pelatihan *Life Cycle Cost (LCC)* Angkatan 1 dengan tema "*Green Infrastructure Planning and Implementation*". Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta agar mampu menganalisis nilai ekonomis sebuah bangunan sepanjang umur hidupnya dengan menerapkan konsep keberlanjutan mulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan bahkan demolisi dengan tujuan efisiensi biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta biaya energi pada proyek-proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Royal Kuningan Jakarta pada tanggal 11-12 Maret 2014 dengan menghadirkan narasumber Ahli LCC dari MCM Value Sdn Bhd, *School of Quantity Survey (SQS) Indonesia* dan *University Teknologi Malaysia (UTM) - Malaysia*. Adapun peserta pelatihan ini berasal dari Pengguna Jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi di seluruh Indonesia, Penyedia Jasa/BUMN; Asosiasi Profesi; Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Daerah (LPJKN/D); serta Pembina Jasa Konstruksi Daerah. Mereka menerima materi antara lain, meliputi: Sejarah dan Konsep LCC, Elemen LCC, Konsep "*Time Value of Money*", Proses Implementasi LCC, Aplikasi LCC, serta Teknik-teknik dalam LCC.

Penulis Staf Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi  
Badan Pembinaan Konstruksi



# DISTANCE LEARNING KEAHLIAN KONSTRUKSI

## Masa Depan Pengembangan Sumber Daya Manusia Konstruksi

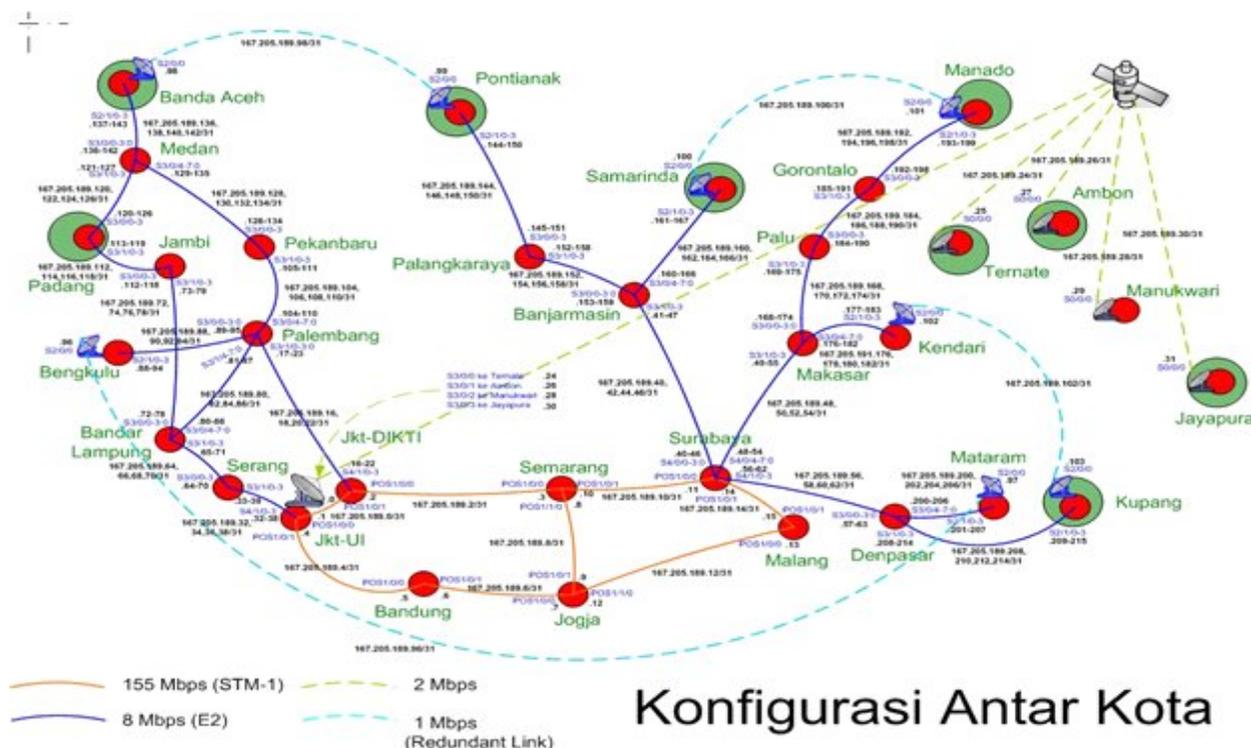
Oleh: Panani Kesai <sup>\*</sup>), Masrianto <sup>\*\*</sup>), Doedoeng Z. Arifin <sup>\*\*\*</sup>)

Meningkatkan kompetensi lulusan teknik, khususnya teknik sipil untuk siap memasuki dunia kerja merupakan tugas utama universitas atau perguruan tinggi agar lulusannya mampu bersaing dalam dunia kerja. Tetapi nampaknya hal ini tidak hanya menjadi tugas universitas semata. Banyak stakeholder yang harus juga ikut andil di dalamnya sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU yang mempunyai kepentingan dalam pembinaan peningkatan daya saing badan usaha dan perlindungan kepada masyarakat atas produk konstruksi yang mereka terima.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja konstruksi di tanah air, Badan Pembinaan Konstruksi terus melakukan upaya untuk berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi yang masuk pasar kerja. Salah satu tugas yang diemban oleh Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi melalui Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi adalah meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi Indonesia, baik di level muda, madya dan utama. Tenaga ahli

konstruksi di Indonesia sesuai data statistik (BPS 2013) ada 270 ribu orang atau 4% dari keseluruhan tenaga kerja konstruksi per tahun 2013 yang berjumlah 6,9 juta jiwa.

Dari 270.000 tenaga ahli konstruksi, kini sudah ada 112.000 orang yang bersertifikat (BPS 2012) dan sisanya sebanyak 158.000 belum bersertifikat. Jumlah inilah yang menjadi sasaran pembinaan Balai bersama stakeholder jasa konstruksi lainnya. Dengan kapasitas Balai menyelenggarakan pelatihan keahlian konstruksi bersertifikat sebanyak 3000 peserta per tahun, maka jumlah di atas baru dapat diselesaikan setidaknya dalam kurun waktu 50 tahun, alangkah menyedihkannya nasib bangsa ini kalau pendekatannya *business as usual* atau biasa-biasa saja. Belum lagi setiap tahunnya pasokan tenaga ahli konstruksi juga meningkat dengan jumlah rata-rata 9 ribu orang (BPS 2010 – 2013). Oleh karena itu diperlukan pendekatan dan system delivery pelatihan yang tidak biasa dan bersifat massal. Ada beberapa kemungkinan yang dapat didorong untuk menyelenggarakan pelatihan massal, di antaranya adalah: melibatkan seluruh stakeholders sebagai penyelenggara pelatihan seperti



Gambar 1. Konfigurasi broadband antar kota sebagai backbone pelatihan jarak jauh keahlian konstruksi (distance learning)



Gambar 2. Sistem, subsistem, dan metode pembelajaran pelatihan jarak jauh (distance learning)

pemerintah provinsi, LPJK provinsi, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, dan perguruan tinggi; mendorong sektor swasta untuk menyelenggarakan pelatihan dengan memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi lembaga pelatihan konstruksi (LPK); membangun sistem pelatihan yang dapat melibatkan peserta secara masal, serentak, dan menjangkau posisi peserta di seluruh penjuru tanah air.

#### Pelatihan Jarak Jauh Keahlian Konstruksi (PJJAK) atau Distance Learning

Dari ketiga alternatif di atas, semuanya secara serentak dan paralel dilakukan. Model pertama diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi melalui program pembinaan jasa konstruksi daerah. Model kedua digarap oleh bidang-bidang Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, dan model ketiga diuji coba oleh Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi Pusbin KPK.

Tantangan globalisasi mengharuskan setiap orang memiliki kemampuan mengembangkan dirinya sepanjang masa. Untuk itu, proses pendidikan dan pelatihan tidak boleh hanya merupakan transfer ilmu, namun sekaligus membangun keterampilan belajar (*learning skill*), kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving*), kemampuan menjadi pembelajar mandiri dan interdependen, serta kemampuan komunikasi dan kerja sama. Pendidikan yang demikian tidak mungkin dilakukan dengan metode *lecturing (teacher-centered)*, namun harus *student-centered*. Paradigma pendidikan dan pelatihan (diklat) berpusat pada peserta menjadi basis pengembangan yang diterapkan pada lingkungan diklat online agar peserta menjadi individu yang aktif mengembangkan keterampilan belajar mereka sendiri, sehingga pada akhirnya peserta diklat menjadi *self-directed learners* yang kompeten dan bertanggung jawab.

Pelatihan jarak jauh keahlian konstruksi (PJJAK) atau *Distance Learning* Keahlian Konstruksi (DLAK) adalah suatu lingkungan

pendidikan dan pelatihan (diklat) keahlian konstruksi online berpusat pada peserta diklat yang dikembangkan Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

Lingkungan pendidikan dan pelatihan (diklat) online bukanlah sekedar situs web sebagai tempat memindahkan materi dari kertas ke file elektronik. Lingkungan pelatihan online dapat memindahkan berbagai proses pendidikan dan pelatihan (seperti membaca dan menyajikan materi, berdiskusi, mengikuti ujian, meminta umpan balik, dst), dari tatap muka ke media elektronik (internet).

Sebagaimana pelatihan berbasis kompetensi lainnya, PJJAK mengikuti standar-standar sistem pelatihan kerja nasional (sislatkernas). PJJAK didesain sebagai suatu Pelatihan kerja untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keahlian konstruksi tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Kompetensi kerja keahlian konstruksi yang dimaksud di atas adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada keahlian konstruksi tertentu yang berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan beberapa penjelasan di atas, PJJAK dapat dikatakan sebagai pelatihan berbasis kompetensi kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Mengapa model *distance learning* menjadi pilihan? Ada banyak kelebihan dan keunggulan metode *distance learning* dalam men-*delivery transfer knowledge* kepada para peserta didik. Pertama, dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dengan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas. Kedua, lebih murah karena tidak memerlukan ruang kelas, fasilitator dan peserta tidak perlu bertatap muka secara langsung. Sistem belajar seperti ini akan mengurangi biaya operasional seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung, transportasi, pemondokan, kertas, alat tulis dan sebagainya. Ketiga, tidak terbatas oleh waktu. Peserta dapat menentukan kapan saja waktu untuk belajar. Peserta pelatihan yang berstatus karyawan/pegawai masih dapat berkontribusi bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Keempat, peserta dapat memilih topik atau bahan ajar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing sesuai dengan klasifikasi/subklasifikasi dan jabatan kerja dengan standar SKKNI.

## Pra-Uji Coba PJJAK

Setelah dilakukan kajian singkat mengenai konsep pelatihan jarak jauh dengan melakukan studi literatur dan diskusi dengan penyelenggara Universitas Terbuka yang memiliki pengalaman dan best practices dalam bidang kuliah jarak jauh, pada rencana kerja TA. 2014 Balai secara resmi mendapat penugasan untuk menyelenggarakan uji coba pelatihan jarak jauh. Pada bulan November 2013, Balai melakukan pra-uji coba PJJAK dengan Politeknik Negeri Jakarta bekerjasama dengan Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia. Proses distance learning dilakukan dengan menggunakan mailing list selama dua minggu dan diakhiri tatap muka selama tiga hari dengan jadwal *pre-test*, studi kasus atau pendalaman materi, dan *post-test*.

Hasil evaluasi prauji coba menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan dalam proses belajar mengajar (pelatihan), waktu *distance learning* yang terlampau singkat, studi kasus yang belum terstruktur, *pre-test* dan *post-test* belum mencerminkan kompetensi para peserta, instruktur masih terpaku pola regular, course director belum berfungsi dengan baik, panitia yang masih gagap, dan beberapa kelemahan lainnya yang menjadi pekerjaan rumah untuk uji coba skala penuh pada TA. 2014.

## Uji coba PJJAK Triwulan Pertama

Dalam rangka persiapan, pada pertengahan Januari 2014 Balai mengundang LPJKN, LPJKP DKI Jakarta, seluruh pimpinan pusat asosiasi profesi dan pimpinan program studi teknik sipil yang ada di sekitar DKI Jakarta serta pihak internal BP Konstruksi dan Pusbin KPK untuk membahas dan menawarkan kerjasama PJJAK ini. Asosiasi profesi yang menyambut dengan baik kerjasama boleh dikatakan tidak sampai hitungan jari tangan, justru pihak perguruan tinggi yang antusias. Melihat kondisi seperti ini, Balai melakukan *repositioning* obyek peserta yang semula akan mengoptimalkan para anggota asosiasi profesi menjadi para alumni muda perguruan tinggi untuk diberdayakan, ditingkatkan kapasitas dan kesiapannya memasuki dunia kerja konstruksi. Mereka akan mendapatkan informasi lengkap mengenai *knowledge*, *skill*, dan *attitude* yang diperlukan di dunia kerja sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) melalui PJJAK.

Berbekal jaringan kerja yang sudah dibangun pada TA. 2012 dan 2013 dengan beberapa PTN di tanah air, pada bulan Februari 2014 telah terjalin komunikasi dengan 35 PTN mulai dari Unsyiah Banda Aceh, sampai Uncen Jayapura. Komunikasi dan koordinasi dengan LPJKN, LPJKP, asosiasi profesi, dan asosiasi perusahaan tetap dilakukan dalam setiap rekrutmen peserta yang dikemas dalam kegiatan Forum Konsultasi Peningkatan Keahlian Konstruksi di setiap lokasi provinsi yang akan diselenggarakan PJJAK.

Triwulan pertama berhasil diselenggarakan 11 angkatan dengan hasil yang masih jauh dari menggembirakan, kelemahan-kelemahan prauji coba masih kerap muncul dalam setiap angkatan dengan berbagai variasinya. Namun satu uji

coba di Universitas Cendrawasih Jayapura memberikan harapan segar, penggunaan facebook sebagai sarana distance learning atau e-learning memberikan pengalaman diskusi yang menarik bagi para peserta, instruktur, *course director* (CD), maupun panitia.

Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh dan komprehensif pada awal bulan April yang melibatkan seluruh komponen PJJAK, mulai dari perwakilan peserta, seluruh instruktur, CD, dewan penguji yang berdomisili di Jakarta serta beberapa perwakilan dari Semarang dan Bandung, LPJKN, LPJKP, dan perwakilan asosiasi profesi yang responsif dengan PJJAK, diperoleh beberapa masukan yang berharga untuk perbaikan pada penyelenggaraan PJJAK selanjutnya. Peran CD dan dewan penguji ditingkatkan mulai dari proses *distance learning*, pelibatan asosiasi perusahaan sebagai peserta semakin didorong serta rekomendasi dewan penguji daerah melibatkan unsur USTK LPJKP sebagai upaya untuk memudahkan proses sertifikasi.

## Uji coba PJJAK Triwulan kedua

Selama triwulan kedua berhasil diselenggarakan 24 angkatan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi teknik besar di Indonesia seperti UGM dan UNDIP. Sambutan dan apresiasi dari stakeholders daerah cukup melegakan dan menggembirakan. Dukungan dari para pihak, khususnya pimpinan terhadap PJJAK semakin meyakinkan Balai untuk bekerja lebih keras lagi agar manfaat dan jangkauan PJJAK lebih luas dan dapat bersifat masal. Walaupun masih masih jauh dari ideal, sebagai gambaran bahwa Universitas Terbuka dapat establish seperti sekarang setelah melewati proses panjang hampir 20 tahun, Balai optimis pada triwulan ketiga dan keempat penyelenggaraan PJJAK akan lebih baik lagi.

Evaluasi triwulan kedua membahas berbagai kelemahan dan kekurangan yang masih kerap muncul dalam beberapa angkatan. Evaluasi terhadap kompetensi instruktur dan CD



Gambar 3. Model grafis e-learning

dalam hal komunikasi online serta sarana komunikasi dengan facebook maupun *mailing list* menjadi salah satu bahasan yang cukup sengit. Forum evaluasi merekomendasikan beberapa hal penting, di antaranya penguatan kapasitas instruktur yang masih gptek, dukungan konsultan perorangan untuk mengevaluasi SKKNI, KPBK, modul, dan MUK khusus untuk penggunaan PJJAK. Para konsultan ini juga berfungsi sebagai dewan penguji dan course director. Pilihan konsultan diambil dengan pertimbangan selain menghemat biaya jasa profesi, pemanfaatan konsultan sebagai CD jauh lebih dapat dikendalikan oleh Balai daripada CD dari daerah. Rekomendasi lainnya adalah membangun sistem PJJAK berbasis web secara mandiri agar tidak tergantung pada *facebook* dan *mailing list* yang tidak di bawah kendali penuh penyelenggara PJJAK.

### Masa Depan PJJAK

Ibarat manusia, PJJAK masih berupa bayi merah, masih banyak yang harus dipelajari dan diperbaiki sebelum menjadi dewasa dan dapat berjalan mandiri. Continuous improvement adalah kata kunci dalam pengembangan PJJAK. Semua pihak terkait diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam upaya membangun PJJAK menjadi sistem pelatihan yang andal, efektif, dan efisien.

Ketika sistem informasi berbasis web sudah berfungsi penuh. Pendaftaran peserta dapat dilakukan secara online tanpa harus tatap muka dengan panitia, sehingga cita-cita PJJAK dapat diikuti secara masal oleh siapapun di seluruh pelosok tanah air dapat terwujud. Peserta yang sudah terverifikasi dan mendapat *password* dapat *log in* dan *men-download* materi (modul, bahan ajar dst) sesuai jabatan kerja atau subklasifikasi keahlian yang dia pilih. Setelah itu ybs dapat berdiskusi dengan para instruktur dan peserta lainnya. Dalam sistem ini, materi standar kompetensi kerja, modul dan materi ajar, studi kasus untuk pelatihan tingkat ahli dan terampil dapat dipublikasikan dan dilatihkan dengan metoda *distance learning*.

Pada waktu tertentu, instruktur atau narasumber khusus seperti Bapak Menteri, para Dirjen/Direktur dapat mengadakan teleconference secara real time atau kuliah jarak jauh secara tayangan tunda. Pada waktu yang telah ditetapkan, para peserta dapat mengikuti uji kompetensi secara online. Uji kompetensi ini diharapkan dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) yang dikembangkan oleh LPJK dan menjadi bagian dari proses uji kompetensi USTK, sehingga peserta yang lulus secara otomatis dapat memperoleh SKA/SKTK, tentu saja setelah memenuhi dan melengkapi persyaratan SKA/SKTK. Bahkan, sertifikat kelulusan pelatihan dapat langsung dicetak oleh peserta tanpa harus menunggu proses pencetakan di Jakarta, otentifikasi sertifikat cukup dengan *Digital Stamp*.

Bagaimana dengan tatap muka? Walaupun system PJJAK sudah *full online*, tatap muka dapat dilakukan sebagai bonus bagi peserta yang lulus uji kompetensi secara online. Dalam tatap muka versi "bonus", yang dibahas bukan hanya studi kasus dan/atau kunjungan lapangan, namun juga membekali

peserta dengan soft skill yang tidak kalah pentingnya untuk dimiliki oleh para tenaga ahli konstruksi. Pentingnya soft skill terungkap dalam sebuah penelitian dari *National Association of College and Employee* (NACE, 2002) yang menempatkan indeks prestasi kumulatif (IPK) di perguruan tinggi pada urutan ke-17. IPK kalah oleh kemampuan komputer, kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kepercayaan diri, ramah, sopan, dan bijaksana. Namun kemampuan komunikasi, bekerja sama, interpersonal, etika, inisiatif, adaptasi, dan analitik lebih penting daripada komputer.

Dengan segenap kesungguhan para pihak, khususnya internal BP Konstruksi, Pusbin KPK, dan aparat Balai PAK, kiranya cita-cita di atas bukanlah sesuatu yang utopis. Dalam kunjungan kerja Bapak Menteri PU, Joko Kirmanto pada hari Rabu, 6 Agustus 2014 yang lalu, dengan penuh kebakapan dan sifat pengayoman, beliau mengatakan, "Apa yang dapat saya bantu untuk mendukung distance learning keahlian konstruksi ini"? Beliau juga menyatakan bahwa masa depan PU akan berada pada sistem informasi, karena itu *distance learning* adalah satu keniscayaan. Yang tidak terduga, Bapak Menteri dan Kepala Puskompu minta bergabung dalam salah satu angkatan PJJAK. Beliau juga menunjukkan bahwa kemapuan beliau berdinan, tidak lepas dari gadget untuk berkoordinasi dengan para eselon I dan II, termasuk mencari informasi dan belajar mengenai sesuatu yang belum difahami secara tuntas. Kalau Bapak Menteri saja sudah demikian, pilihan kita hanya satu, yaitu bagaimana menyukseskan PJJAK. Insyaa Allah!



Gambar 4. Salah satu materi dalam distance learning



Gambar 5. Contoh diskusi antara instruktur dan peserta

Penulis \*) Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi  
 \*\*) Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi  
 \*\*\*) Kepala Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan Jakarta

*Acara Halal Bihalal Kementerian PU*



*Acara Halal Bihalal BP Konstruksi*







## LANJUTKAN PERJUANGAN MEMBANGUN SEKTOR KONSTRUKSI

**B**adan Pembinaan Konstruksi telah menjalani proses sejarah yang tidak sebentar dan penuh dengan perjuangan. Sejak awal cita-cita perjuangan dengan adanya Undang-undang Jasa Konstruksi oleh para pendahulu sektor konstruksi, hingga saat ini, telah banyak yang dicapai namun juga tidak sedikit yang belum diraih.

“Semoga di masa transisi dan masa perubahan politik ini cita-cita sektor konstruksi tetap dapat dilanjutkan demi kemajuan bangsa”, ujar Kepala BP Konstruksi Hedyanto W. Husaini pada acara Halal bi Halal keluarga besar Badan Pembinaan Konstruksi, Selasa (12/08) di Jakarta.

Dihadiri segenap staf dan pimpinan di Lingkungan BP Konstruksi, halal bi halal kali ini menjadi istimewa oleh kehadiran para pendahulu Badan Pembinaan Konstruksi atau yang mengawalinya, serta para purna bhakti BP Konstruksi. Para pendahulu Badan Pembinaan Konstruksi tidak hanya hadir, namun juga berbagi visi, misi, dan harapan akan sektor jasa konstruksi.

Wibisono Setiowibowo, mantan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (Bapekin), menyampaikan bahwa sektor konstruksi masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam lingkup nasional. Untuk itu jangan sungkan untuk selalu menjalin kerjasama dan meningkatkan diri tidak hanya kemampuan teknis tapi juga kemampuan yang lain. Tak hanya itu, program-program seperti Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) harus terus dijalankan karena menyentuh kepentingan rakyat.

Sedangkan Sri Hadiarti, mantan Kepala Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM), mengapresiasi telah disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Namun menurut Sri Hadiarti perlu untuk segera ditambah dengan penetapan Undang-undang Arsitek, untuk semakin melindungi pelaku konstruksi bersaing di pasar bebas.

“Di lingkup ASEAN tinggal Indonesia dan Timor Leste yang belum memiliki Undang-undang Arsitek, tentunya hal ini harus dikejar jika tidak ingin kalah di persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya”, tutur Sri Hadiarti. Kemudian mantan Kepala BPSDM ini juga mengajak semua yang hadir untuk mendorong pelestarian situs-situs warisan budaya (heritage). Sebab bangsa yang besar adalah yang menghargai sejarahnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan Kepala BP Konstruksi Bambang Goeritno mengatakan agar forum diskusi untuk mengembangkan sektor konstruksi lebih intens dilaksanakan. Diakuinya bahwa hingga saat ini kuantitas dan kualitas serta pemerataan infrastruktur masih belum seperti yang diharapkan. “Semua pihak terutama pemerintah masih harus memacu diri mengerjakan pekerjaan rumah untuk membangun konstruksi. Seharusnya kebijakan yang merakyatlah yang mulai saat ini dilakukan dan didukung”, ujar Bambang Goeritno.

Menutup diskusi, Kepala BP Konstruksi mengakui bahwa sektor konstruksi harus dibangun dan didukung semua stakeholders terkait agar bisa mampu bersaing. Seperti



permodalan yang belum diberikan maksimal untuk mendukung pelaku jasa konstruksi Nasional menembus pasar global. "Bagaimana mungkin bisa bersaing jika modal saja masih harus mengais kesana kemari", ungkap Hedyanto.

Rantai pasok konstruksi seperti material peralatan juga belum tersedia dengan baik di Indonesia. Seringkali perusahaan konstruksi harus menghentikan proyek pekerjaan karena kekurangan material atau belum ada jaminan akan ketersediaannya.

Dari sisi sumber daya manusia pun juga sangat perlu dukungan dari banyak pihak. Menurut data, rasio insinyur kita rata-rata hanya 200 orang per hari, sedangkan di Korea sudah mencapai 1000 orang per hari. Jumlah yang masih jauh untuk diraih. Dari

kesemua hal tersebut sangat perlu untuk menambah wawasan pelaku sektor konstruksi.

Menjadi multitalenta yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis adalah salah satu kuncinya. Sosialisasi dan networking juga menjadi tambahan upaya untuk mendorong jasa konstruksi lebih berdaya saing. "Jangan sungkan untuk belajar dari private sector jika memang perlu", ajak Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, menutup diskusi yang penuh kehangatan tersebut.

Selain diskusi, halal bi halal BP Konstruksi kali ini juga diisi tausiyah oleh ustadz Abdul Hakim. Acara ini juga dimeriahkan penampilan tim Kulintang Dharma Wanita Persatuan unit BP Konstruksi dengan lagu yang dibawakan oleh pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi. (tw/hl)



Seluruh Pejabat dan Karyawan  
Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum  
mengucapkan :

# Selamat Idul Fitri

1 Syawal 1435 H

## Mohon Maaf Lahir dan Batin



## KEUNGGULAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI DI DAERAH HARUS TERUS DIJAGA

**S**umatera Utara sering dijadikan role model dalam pembangunan di Wilayah Sumatera. Hasil pembangunan infrastruktur di Sumut juga cukup terlihat maju, diantaranya pembangunan Bandara Kualanamu di Deli Serdang, pembangunan transportasi kereta bandara, dan beberapa pembangunan *flyover*. Tetapi yang jadi pertanyaan apakah pembangunan tersebut banyak melibatkan masyarakat konstruksi di Sumatera Utara?

“Saya berharap Sumatera Utara dapat terus menjaga keunggulannya dalam pembangunan, jangan malah semakin merosot dan kalah bersaing dengan provinsi lain di Sumatera. Keberhasilan total dalam pembangunan adalah jika seluruh teman-teman yang

berkecimpung di bidang konstruksi terlibat dalam pembangunan tersebut”, ujar Hedyanto pada acara Forum Konsultasi Program Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Wilayah Sumatera Utara, Rabu (14/08) di Medan.

Untuk membantu mengatasi merosotnya daya saing di Sumatera Utara, Badan Pembinaan Konstruksi melalui Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang ditujukan bagi para kontraktor dan operator. Selain itu yang perlu dilakukan adalah dengan membina kekompakan masyarakat jasa konstruksi di Sumatera Utara ini untuk dapat memajukan persaingan. Diharapkan para pelaku konstruksi tetap dapat bersaing secara sehat dan tidak membesar-besarkan masalah yang kecil.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta yang berasal dari Dinas, Universitas, LPJK Provinsi, dan Asosiasi di wilayah Sumatera Utara. Beberapa narasumber yang berkesempatan memberikan materi diantaranya adalah Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Masrianto; Pembina Jasa Konstruksi Sumatera Utara, Ibnu S. Utomo; Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Robinson.

“Saya sangat bangga jika Sumatera Utara dapat kompak untuk membangun infrastrukturnya. Mulailah berpikir dari hal kecil untuk meningkatkan daya saing infrastruktur disini”, tutup Hedyanto.



Kunjungan ke Balai Aceh, Ujung tombak Pelatihan Konstruksi di Sumatera

Seusai mendampingi Kepala BP Konstruksi pada acara Forum Konsultasi Program Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Wilayah Sumatera Utara, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (Pusbin KPK), Masrianto melakukan kunjungan ke Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh pada Jumat (15/08). Kunjungan ini dalam rangka ramah tamah dengan seluruh pegawai di Balai sekaligus meninjau Workshop yang terdapat di Balai Aceh.

Balai Aceh memiliki beberapa Workshop, diantaranya adalah workshop sheet metal, welding, carpentry, masonry, concrete work, plumbing, electrical, ruang gambar, dan surveying. Beberapa peralatan yang ada di Balai ini merupakan alat hibah dari Pemerintah India yang diberikan pada tahun 2011. Dengan berjalannya waktu, peralatan tersebut beberapa mengalami kerusakan dan pada akhirnya tidak bisa digunakan karena suku cadangnya tidak tersedia di Indonesia.

Sebelumnya Masrianto mendampingi Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Hedyanto W. Husaini bertemu dengan Konsulat India di Medan pada Rabu (13/08) terkait pembicaraan mengenai



kerusakan alat konstruksi dan pencarian solusi dari permasalahan tersebut dan kelanjutan kerjasama antara Indonesia dan India.

Dalam kunjungan kali ini ke Balai Aceh, Masrianto memberikan pujian atas kemajuan yang dialami oleh Balai Aceh, setelah sebelumnya Kepala Balai Aceh, Sutjipto menceritakan sejarah singkat terbentuknya Balai Aceh hingga sekarang ini. Selain mengunjungi workshop, Masrianto juga sempat mengunjungi peserta yang sedang mengikuti Pelatihan Tukang Bidang Konstruksi Tingkat Pemula Angkatan 5 yang sedang berlangsung.

“Saya berterima kasih atas sambutan yang baik ini. Dan saya cukup bangga melihat kemajuan dan perkembangan dari Balai Aceh, semoga teman-teman disini dapat terus berjuang untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelatihan di Balai ini. Kami dari pusat juga akan terus memberikan dukungan”, ujar Masrianto menutup kunjungannya. (ka/tw)



# PROFIL LEMBAGA: LPJKD SUMATERA UTARA

**B**erlokasi tak jauh dari pusat kota Medan, tepatnya di Jl. Alfalah No. 22 Medan, Sumatera Utara, kantor Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah provinsi Sumatera Utara berdiri. Siang itu, kantor LPJKD terlihat sibuk dengan banyaknya utusan Asosiasi yang sedang mengurus izin bagi anggota-anggotanya. Di bawah kepemimpinan Ir. Murniati Pasaribu, LPJKD Provinsi Sumatera Utara ini memang termasuk LPJKD yang paling aktif. "Semenjak dikukuhkan Gubernur Sumatera Utara melalui Struktur Kepengurusan LPJKP Sumut dikukuhkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut No : 188.44/95/KPTS/2012 tanggal 03 Februari 2014 tentang Pengurus LPJKP Sumut Periode Tahun 2012 – 2016, pengurus LPJKD aktif melakukan sosialisasi ke Dati II tentang aturan Peraturan Lembaga dan dengan instansi terkait dan Asosiasi Perusahaan" tutur Murniati.

Namun demikian, tetap saja terdapat kendala yang ditemukan dalam menjalankan tugas. "Kendala yang dihadapi oleh Pengurus terkait dengan Pengembangan Jasa Konstruksi di Sumut adalah proses tentang Keberadaan LPJK tentang logo yang sah dan tidak sah." Ujar Murniati. "Solusinya saat ini sudah terselesaikan dengan baik dengan adanya dukungan Pemerintah dan LPJK Nasional" lanjutnya. Oleh pengurus LPJK Nasional maupun pejabat BP Konstruksi pun, LPJKD Provinsi Sumatera Utara dikenal aktif berkonsultasi dan berkomunikasi dalam setiap permasalahan yang dihadapi di daerahnya. Hal ini senada dengan ajakan Kepala BP Konstruksi yang menyerukan agar Pemerintah dan Lembaga 'Proaktif, fokus, dan kompak' untuk melayani stakeholders konstruksi,

Mengenai anggapan masyarakat luas bahwa selama ini LPJK hanya mengurus sertifikasi saja, Murniati mengakui

sampai saat ini memang LPJKP Sumut masih cenderung mengurus sertifikasi. Namun demikian, LPJKP Sumut juga melakukan sosialisasi, seminar dan pelatihan. LPJKD Sumatera Utara bahkan tak jarang mengundang narasumber dari LPJK Nasional dan Pemerintah Pusat, agar para pelaku jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tak dilakukan agar setiap kebijakan yang ditetapkan dapat segera tersampaikan, dimengerti, dan dilaksanakan oleh para pelaku jasa konstruksi di lapangan.

Meski demikian, Murniati mengaku belum mengetahui secara pasti apakah jumlah BUJK yang ada telah memenuhi kebutuhan pembangunan Infrastruktur di Sumatera Utara. Menurutnya untuk itu masih perlu dilakukan penelitian mengenai sebab LPJKP Sumut tidak memperoleh tentang jumlah nilai pekerjaan yang kecil dan non kecil.

"Memang kenyataan kualifikasi kecil lebih banyak dari kualifikasi besar karena peluang pekerjaan hanya untuk yang kecil sementara yang besar diambil oleh badan usaha yang dari luar provinsi Sumatera Utara dan BUMN" ungkap Murniati. "Solusi yang diambil, membuat kebijakan peraturan untuk pemberdayaan pengusaha kecil" lanjutnya. Dengan demikian, pengusaha kecil dapat tetap mendapatkan porsi pekerjaan dan tidak tersingkir dari badan usaha besar yang berasal dari luar provinsi. "Agar tidak sampai terjadi Pengusaha kecil / ikan teri dimakan

Pengusaha besar / ikan paus", tambahya.

Terkait dengan pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Konstruksi Provinsi, Murniati menyatakan "di Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan sesuai ketentuan. Akan tetapi memang belum semua masyarakat Jasa Konstruksi yang mempunyai / memiliki pekerjaan melakukan konversi. Sedangkan masyarakat jasa konstruksi yang tidak memiliki pekerjaan tidak / belum melakukan konversi".

Menurut data ketika wawancara dilaksanakan pada bulan Juni 2014, baru 146 lembar konversi sertifikat yang dikeluarkan, 145 di antaranya berasal dari asosiasi-asosiasi yang termasuk dalam kelompok unsur di LPJK, sedangkan dari asosiasi non-unsur hanya satu lembar sertifikat. Hal ini ditengarai karena adanya anggapan bahwa penggunaan SBU dipandang masih sebatas untuk keperluan pekerjaan saja. Jadi ketika mereka tidak menggunakannya dalam pekerjaan (Pemerintah), maka belum merasa perlu untuk mengikuti konversi SBU.

"Kerjasama dan komunikasi LPJKP Sumut dengan seluruh stakeholder selama ini telah berjalan dengan baik. Meski demikian, peran dari pembina sangat dibutuhkan agar pengembangan jasa konstruksi di Sumatera Utara lebih maju" tutupnya. (mu)



# Ir. Sutami

## BAPAK PRE-STRESS CONCRETE DI INDONESIA

**M**elihat perkembangan dunia konstruksi saat ini, mungkin tak banyak dari generasi muda yang mengetahui bahwa dunia konstruksi Indonesia memiliki sosok tokoh yang luar biasa, yaitu Prof. Dr. Ir. Sutami. Orang lebih mengenalnya sebagai Ir. Sutami, seperti sebuah bendungan serbaguna di daerah Malang, dan beberapa nama jalan di Indonesia mengabadikannya.

Putera bangsa kelahiran 19 Oktober 1928 di Surakarta ini melewati masa pembelajarannya dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Surakarta. Setelah itu, baru "hijrah" ke Bandung untuk berkuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung (pada tahun 1959 bersama Fakultas MIPA menjadi Institut Teknologi Bandung). Sutami juga pernah memperoleh anugerah doctor honoris causa dalam ilmu teknik dari Universitas Gadjah Mada.

Karyanya sangat dekat dengan kita semua. Sebut saja Jembatan Ampera di Palembang (merevisi desain pihak Jepang), Jembatan Semanggi dan gedung DPR/MPR di Jakarta adalah contoh produk infrastruktur hasil karyanya. Di artikel ini kita akan mencoba mengenal sosok Sutami lebih dekat melalui wawancara dengan salah satu orang yang dekat dengannya: Suyono Sosrodarsono, Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988).

Pagi hari yang cerah mengiringi wawancara dengan sosok bersahaja yang meski sudah tidak muda lagi namun tetap penuh semangat. Dia adalah Suyono Sosrodarsono, mantan Menteri PU yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengairan semasa kepemimpinan Sutami sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL).

Menurut penuturannya, sejak mengenal Sutami semasa kuliah di Bandung, Sutami memang dikenal sebagai mahasiswa yang jenius. "Dia begitu pintar, pandai sekali. Kalau latihan-latihan



mengerjakan soal-soal teknik beton dia yang mengajari", kenang Suyono. Bahkan dia mengajari bukan hanya teman-teman seangkatannya, tapi juga angkatan-angkatan di atasnya, termasuk Suyono yang dua tahun di atas angkatan Sutami. Selain itu, dia juga bertugas sebagai Mahasiswa Asisten untuk berbagai mata kuliah.

Dalam periode yang sama, Sutami juga menjadi Asisten Konstruksi Beton pada Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga (ATPUT) serta mengajar mata pelajaran Mekanika Teknik pada Sekolah Teknik Menengah di Bandung.

"Sutami itu jenius bukan hanya secara teori, tapi juga pada *applied construction*", ujar Suyono. Kejeniusan Sutami dalam konstruksi semakin terasah ketika beliau menjadi pegawai Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) N.V. atau yang

sekarang lebih kita kenal sebagai PT. Hutama Karya (persero) sejak bulan Mei 1956. Waktu itu Sutami ditugaskan pada pelaksanaan Proyek Penjernihan Air di Pejompongan Jakarta, sebelum dipindahkan ke proyek yang sama di Bandung.

Pada 8 Januari 1958, Sutami diangkat sebagai Kuasa Direksi HBM N.V. untuk pelaksanaan Proyek -proyek Pelabuhan, dan pada bulan Juli tahun yang sama beliau diangkat sebagai Pemimpin Cabang II Jakarta HBM N.V. Tak perlu menunggu waktu lama hingga beliau diangkat sebagai Direktur Pelaksana (*Managing Director*) HBM N.V pada bulan Pebruari 1959, dan sejak 5 Mei 1961 hingga 1 Juni 1966 menjadi Direktur Utama PN. Hutama Karya. Jabatan ini pada mulanya bernama Direktur PN, kemudian diubah menjadi Presiden Direktur, dan sekarang disebut Direktur Utama.

Karier Sutami meningkat lebih pesat lagi hingga pada bulan Mei 1965 dia dipercaya sebagai Menteri Negara untuk urusan Penilaian Konstruksi dalam Kabinet Dwikora. Ketidakpastian situasi politik pada masa itu tidak meluruhkan kepercayaan presiden kepadanya. Bulan Pebruari 1966, Sutami diangkat sebagai menteri Koordinator Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan.



dengan Analisa Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, “Ilmu Wilayah, Implikasi dan Penerapannya dalam Pembangunan di Indonesia”, serta “Ilmu Wilayah dalam hubungannya dengan Pembangunan Negara”. Terkait manajemen sumber daya manusia, Sutami juga menulis “Manusia Indonesia dalam Proses Pembangunan”.

Atas pengabdian dan konsistensinya dalam bidang yang ditekuninya, Sutami memperoleh Bintang Mahaputera Adipradana, Satya Lencana Pembangunan, serta Piagam Anugerah Departemen Pendidikan dan

Ketika Kabinet Dwikora disempurnakan lagi pada bulan Maret 1966, dia kembali dipercaya menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. Demikian pula dalam Kabinet Ampera pada bulan Juli 1966, dia ditetapkan sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Posisi ini masih dipercayakan kepadanya, hingga pada Kabinet Pembangunan II dimana beliau diangkat menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pada bulan Maret 1973.

Kiprah keilmuannya pun semakin diakui ketika pada tahun 1960 Sutami menjadi anggota Dewan Riset Nasional. Dia juga ikut mengembangkan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan menjadi Pembantu Dekan I Fakultas tersebut pada awal tahun 1963. Selanjutnya pada tahun 1967, dia diangkat menjadi Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Puncaknya pada tahun 1976, Sutami dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Wilayah oleh Universitas Indonesia.

Pengukuhan Guru Besar tersebut tidak lepas dari aktivitasnya dalam menulis berbagai karya ilmiah di bidang konstruksi yang digelutinya. Tercatat di antara karya-karya yang telah beliau hasilkan antara lain: “Konstruksi Beton” (terdiri atas empat bagian), “Perkembangan Beton di Indonesia” (terdiri atas empat bagian yang diterbitkan oleh Majalah PII), “*Ultimate Strength Design*” (terdiri atas empat bagian, juga diterbitkan oleh Majalah PII), serta “Beton Rapat Air”.

Selain itu, beliau juga menulis mengenai “Rencana Pembukaan Persawahan Pasang Surut di Kalimantan dan Sumatera dengan Target 5,25 juta Ha dalam Jangka Waktu 15 Tahun”, “Pembukaan Persawahan Pasang Surut secara agak besar-besaran”, serta “Beberapa Pengertian dan Data mengenai Sistem Pengairan yang terdapat di Indonesia”.

Dalam bidang ilmu wilayah, Sutami juga menghasilkan beberapa tulisan, antara lain: “Ilmu Wilayah dalam Kaitannya

Kebudayaan sebagai Pengabdian dan Pendorong dalam bidang *Science dan Technology*. Tak hanya dihargai di dalam negeri, Sutami juga mendapatkan penghargaan dari luar negeri, yaitu Bintang *Ancient Order of Sikatunna Medal Maginoo* dari Filipina, serta Bintang *Grand-Croix De Leopold II* dari Belgia.

#### Proyek-proyek Monumental

Semasa menjabat, Sutami memainkan peranan penting dalam proyek-proyek besar dan monumental yang masih dapat kita nikmati kemegahannya hingga saat ini. Di antaranya adalah Jembatan Semanggi, Gedung Conefo (sekarang kita lebih mengenalnya sebagai Gedung DPR/MPR), serta standar tiang patung Pembebasan “Irian Barat” dan patung Dirgantara atau yang sering disebut dengan patung Pancoran.

Jembatan Semanggi pada tahun 1959 merupakan salah satu karya besar Sutami mengingat itulah pertama kalinya penggunaan teknologi pre-stress concrete di Indonesia. Apalagi kondisi keuangan, material, dan teknologi yang ada pada waktu itu masih sangat minim. Saat itu bahkan Kementerian PU belum memiliki komputer untuk melakukan perhitungan sipil yang rumit.

“Ketika membuat Gedung Conefo baru PU memiliki komputer. Departemen PU itu Departemen pertama yang memiliki komputer. Unit komputer itu begitu besar sehingga hampir memenuhi suatu kamar yang luasnya kira-kira 3x4 meter, diletakkan di ruang khusus di Gedung Pusdata dan orang yang hendak memasuki ruangan tersebut harus melepas sepatu dan menggantinya dengan sandal khusus seperti di ruang ICU” terang Suyono.

Waktu itu masih sedikit sekali orang PU yang bisa mengoperasikan komputer. Salah satu ahlinya yaitu DR. Ing. Purnomo Sidi, yang kemudian menjadi Menteri PU menggantikan Pak Tami.

"Ada suatu tim terdiri dari tiga orang tokoh di bawah koordinasi Pak Tami, yang pada waktu itu mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk membangun gedung Conefo (*Conference of New Emerging Forces*) yaitu Dipl. Arch. Soejudi sebagai arsitek perencana, Dr. Ir. Sutami yang melakukan perhitungan struktur merangkap koordinator, serta Dr. Ing. Purnomo Sidi yang membantu melakukan perhitungan menggunakan komputer dan memimpin pekerjaan pelaksanaan. Presiden Soekarno menghendaki sebuah ruangan besar untuk *conference* yang tidak boleh ada tiang-tiang di dalamnya" terang Suyono. Ini adalah sesuatu yang untuk pertama kalinya dibuat di Indonesia. "Di tengah kondisi keuangan dan material yang terbatas, akhirnya gedung itu selesai juga tanpa bantuan luar negeri. Waktu itu pabrik semen baru ada dua, Semen Padang dan Semen Gresik", sambungnya.

Meski demikian, tidak sekalipun Sutami menyombongkan diri dengan berbagai keberhasilan proyek-proyek yang dijalankannya. "Padahal gedung seperti DPR/MPR itu hanya satu-satunya di Indonesia", jelas Suyono. Kesederhanaan dan kerendahan hatinya tidak luntur dengan berbagai mega proyek yang ditangani dan dipeloporinya.

Suyono mengingat Sutami sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati. "Sederhananya itu dari perilaku sehari-hari, karakter, serta caranya berkomunikasi dengan lingkungan dalam pergaulan. Beliau itu rendah hati, apalagi sebagai manusia teknik, sangat berkualitas" terang Suyono. "Kalau saya boleh menyebut, dia adalah Bapak *pre-stress concrete* di Indonesia" tekannya.

Hobi Mengunjungi Daerah-daerah Terpencil dan Ihwal Kurang Gizi

Lalu apa yang paling diingat tentang kebiasaan Ir. Sutami? Tak lain dan tak bukan adalah kebiasaannya mengunjungi daerah-daerah terpencil, untuk melihat langsung kondisi dan bagaimana penerapan kebijakan di lapangan (yang saat ini lebih populer dengan istilah "blusukan"). "Pak Tami kan sukanya keliling daerah-daerah. Sampai ke pelosok-pelosok juga orang kenal dia", tutur Suyono. Wilayah Indonesia yang begitu luas dan kondisi medan yang masih sangat berat tidak menjadi halangan bagi Sutami untuk melihat langsung situasi lapangan. "Jangan dibayangkan jalan-jalan seperti sekarang. Dulu itu saya kalau ikut keliling kadang-kadang naik truk, naik jip double gardan, atau kalau perlu jalan kaki", lanjutnya.

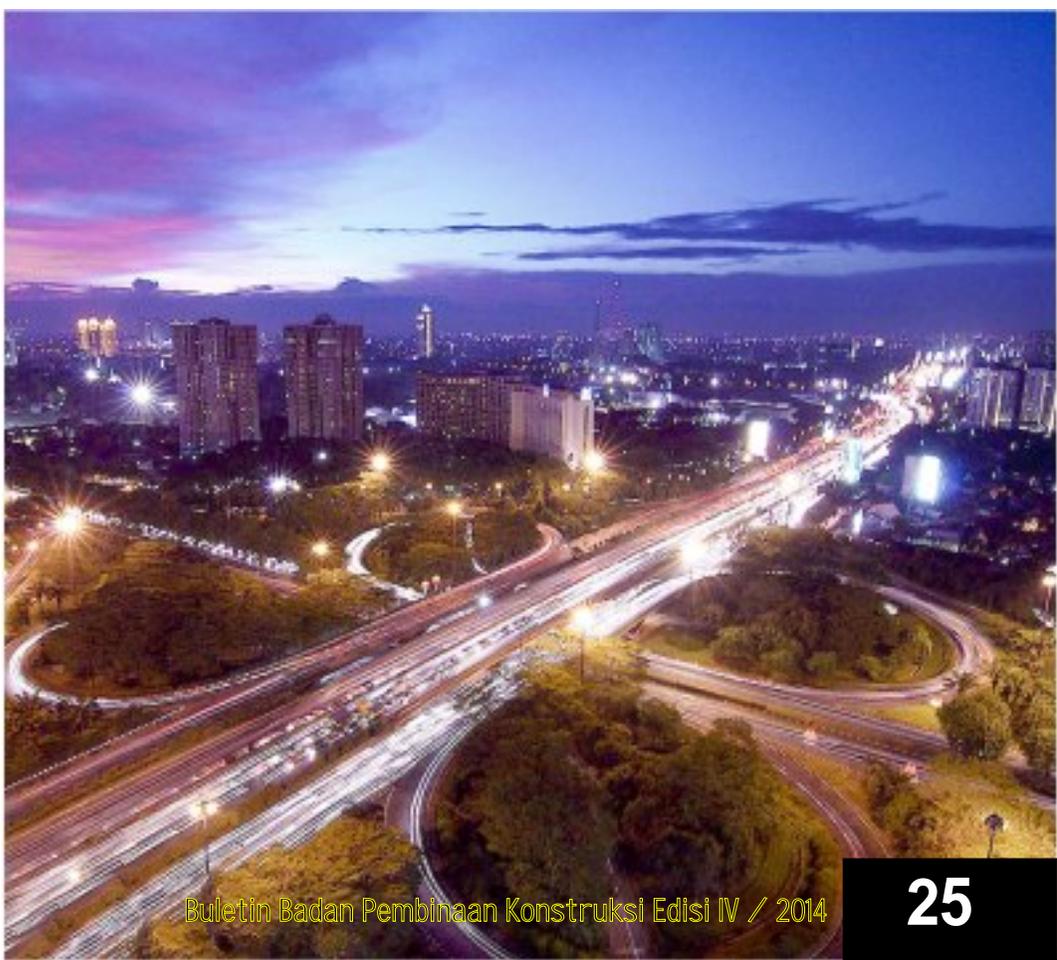
Hanya saja kesukaan Sutami berkeliling melihat langsung kondisi lapangan hingga ke pelosok-pelosok

Nusantara itu tidak ditunjang dengan fisik yang baik. Suyono menyebutkan bahwa Ir. Sutami kurang makan teratur karena sakit gigi yang dideritanya.

"Dia itu "takut" sama dokter gigi", ungkap Suyono. "Padahal sudah diingatkan oleh teman-teman sejawat untuk menjaga kesehatan. Tapi dengan sakit giginya itu, dan "takut" sama dokter gigi, jadi ya dia cuma bisa makan sedikit yang itu melemahkan kondisi fisiknya" tambahnya. Rendahnya jumlah intake nutrisi yang dapat masuk ke dalam tubuh, padahal aktivitas tetap tinggi, membuat Sutami mengidap penyakit yang tak seorangpun akan menyangka diderita oleh seorang selevel menteri: kurang gizi.

Setelah tidak lagi menjadi Menteri PU, Ir. Sutami menyatakan tidak bersedia ketika diminta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Dia juga telah berpesan kepada keluarganya untuk tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, meski Presiden Soeharto ketika itu memerintahkannya. Pak Tami kemudian dimakamkan di Tanah Kusir.

Melihat keteladanan Sutami, Suyono berpesan kepada generasi muda "untuk dapat maju harus belajar dengan sungguh-sungguh, bersedia bekerja keras, dan menjunjung tinggi disiplin. Termasuk disiplin waktu. Kalau kita kurang siap, di tahun 2015 Indonesia akan dibanjiri tenaga luar negeri dengan kemungkinan kita hanya menjadi penonton". Jangan sampai apa yang telah dirintis oleh Sutami menjadi sia-sia. Bangsa ini membutuhkan Sutami-Sutami muda yang bersedia belajar dan bekerja keras untuk dapat melanggengkan semangatnya. (mu)



## HARAPAN SOLUSI SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI: PENDIRIAN BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI INDONESIA

**M**enteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan para pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum bersama-sama dengan beberapa tokoh hukum dan konstruksi terkemuka dan terpercaya di Indonesia melaksanakan pertemuan, pada Selasa (19/08) di ruang rapat Menteri PU. Pertemuan ini tidak hanya sekadar pertemuan anjungsana biasa, tapi pertemuan yang didasari kepedulian akan kondisi konstruksi di Indonesia yang salah satunya masih menghadapi rawannya sengketa dalam pelaksanaan kontrak konstruksi.

“Kontrak konstruksi itu berbeda dengan kontrak-kontrak yang lain. Sifatnya dinamis, berdurasi relatif panjang, kompleks dengan kemungkinan perubahan harga dan ukuran yang bisa berubah sewaktu-waktu”, ungkap Djoko Kirmanto. Karena itulah kontrak konstruksi cenderung lebih rawan konflik yang bisa berujung

Bahkan ketika sampai ke Pengadilan, penyelesaian sengketa bisa berlarut-larut dan lama. Imbasnya adalah terhambatnya proyek pembangunan Infrastruktur yang berarti merugikan rakyat.

Karena itulah Pertemuan pada hari itu menjadi hari tonggak sejarah, dengan pendirian Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI). Pendirian Badan ini didasari pada kebutuhan penyelesaian sengketa yang rawan terjadi pada kontrak konstruksi.

“Bukan berarti selama ini belum ada Badan yang mengurus sengketa, sebab memang telah ada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Hanya saja belum ada yang khusus menangani persoalan konstruksi yang lebih rumit”,

terang Menteri PU. Dengan adanya BADAPSKI ini diharapkan menjadi solusi penyelesaian sengketa konstruksi dengan cepat, murah, berkepastian hukum dan tidak merusak hubungan antara para pihak yang bersengketa.

Meski demikian menurut Menteri PU, harus dipastikan kredibilitas dari para pendiri BADAPSKI ini. Karena kepercayaan yang menjadi modal dasar baik pada saat mulai sengketa hingga akhirnya saat menyelesaikan sengketa itu sendiri. “Dan harus dipastikan bahwa prinsipnya bukan mencari kemenangan pihak tertentu, tapi mencari keadilan”, tegas Djoko Kirmanto.

BADAPSKI didirikan oleh berapa tokoh bidang hukum dan konstruksi terkemuka dan terpercaya antara lain : Abdul Rahman Saleh (Mantan Jaksa Agung), Hikmahanto Juwana, Hadiman, R o e s d i m a n Soegiarto, Satya Arinanto, Wiratman Wangsadinata, Sudarto, Bintang Perbowo, Agus Rahardjo, Hedyanto W. Husaini, Amad Sudiro, Sarwono Hardjomuljadi, Firman Wijaya, dan Erie Heriadi.



Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini mengatakan pendirian BADAPSKI adalah salah satu usaha menyiapkan keterbukaan pasar di ASEAN pada 2015 nanti (MEA). “Pelaku jasa konstruksi kita harus bekerja dalam kondisi yang nyaman dan kondusif untuk bisa bersaing”, ujar Hedyanto. Jika kontraktor dan konsultan masih





disibukkan dengan sengketa yang mungkin belum diketahui ujungnya, tentunya sulit untuk berpikir meningkatkan daya saing.

Menurut Kepala BP Konstruksi bahkan saat ini di Indonesia telah mulai masuk Badan Arbitrase dari Luar Negeri yang membantu penanganan sengketa konstruksi, mengingat yang spesial menangani kasus seperti ini belum ada. "Tentunya hal ini merugikan pelaku konstruksi kita, karena cost lebih besar dan belum tentu menjamin penyelesaian yang diterima semua pihak", ungkap Hediyanto.

BADAPSKI nantinya akan terdiri dari: Komite Kehormatan, Komite Pendiri, dan Pengurus Harian. Pengurus Harian akan ditentukan kemudian dalam jangka waktu sesegera mungkin, dengan terdiri dari divisi arbitrase, divisi alternatif penyelesaian sengketa, dan divisi pengembangan sdm.

Sedangkan pakar hukum terkemuka,

Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa arbitrase menjadi solusi selain harus 'habis-habisan' di pengadilan. Bahkan sangat dimengerti apabila ahli konstruksi turut berperan dalam proses arbitrase ini, dengan asumsi apabila suatu persoalan tidak diserahkan kepada ahlinya justru akan menunggu pada kehancurannya.

"Tantangannya hanya apakah Badan ini dipercaya oleh masyarakat konstruksi?", ujar Hikmahanto. Karenanya, kredibilitas dan kerja nyata pendiri dan pengurus BADAPSKI di kemudian hari sangat diperlukan. Menurut ahli hukum yang akhir-akhir sering muncul di media massa ini, dibutuhkan beberapa hal mendasar agar BADAPSKI menjadi kredibel. Yaitu integritas, pemahaman yang komprehensif tentang hukum dan konstruksi, serta terbebas dari isu-isu yang tidak bertanggungjawab.

Hikmahanto juga memberi gambaran singkat mengenai kasus sengketa konstruksi dengan proyek dari dana APBN. Seringkali kasus seperti ini masuk menjadi ranah korupsi dengan asumsi merugikan negara. Padahal untuk dapat dinyatakan menjadi korupsi apabila terbukti ada tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau institusi.

Penyebab sengketa, misalnya karena kenaikan harga material yang mendadak dan membumbung tinggi. Sementara itu Pemerintah yang diharapkan memberikan solusi tidak bisa secara



langsung memberi keputusan, apalagi apabila faktor penentunya bukan berasal dari dalam negeri. "Bila kasusnya seperti ini dan apalagi tidak terbukti adanya indikasi korupsi, maka seharusnya diselesaikan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa", tutur Hikmahanto.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri PU Sarwono Hardjomuljadi yakin bahwa BADAPSKI mampu memberi pilihan penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih damai dan terpercaya, yaitu melalui Arbitrase dan atau Alternatif Penyelesaian sengketa dalam bentuk Dewan Sengketa (dispute board). "Dispute board ini bahkan telah menjadi bagian dari standar bidding dokumen pada proyek-proyek dengan pinjaman luar negeri", ujar Sarwono.

Pada kesempatan tersebut, selain dilaksanakan rapat pendirian, dilakukan juga penandatanganan Deklarasi Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia oleh Menteri Pekerjaan Umum dan seluruh tokoh sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia telah mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mencantumkan alternatif penyelesaian sengketa di samping arbitrase dan litigasi.

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pembina sektor konstruksi mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi dalam penyelesaian sengketa konstruksi, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. \* (tw)





# DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-69

Badan Pembinaan Konstruksi  
[bpkonstruksi.pu.go.id](http://bpkonstruksi.pu.go.id)

KOMPETENSI | INTEGRITAS | TRANSPARANSI | AKUNTABILITAS

